



DPRD KOTA YOGYAKARTA
SUARA WAKIL RAKYAT
JL. IPDA TUT HARSONO 43 YOGYAKARTA TELP.(0274) 540650

Pemilu 2024 dan Hak-hak Politik Perempuan

YOGYA (KR) - Sejauh ini hak-hak politik perempuan tidak menjadi isu menarik untuk dilirik menjelang Pemilu 2024. Publik lebih banyak 'dipaksa' melirik sajian isu-isu pencapresan. Padahal, hak-hak politik perempuan merupakan amanat undang-undang tentang politik afirmasi.

Wakil Ketua DPRD Kota Yogya Dhian Novitasari, menilai amanat undang-undang tentang afirmasi tersebut terutama berada pada level proses pemilu. Undang-undang belum menyentuh pada level hasil pemilu. "Maka sebenarnya bisa dipandang wajar apabila komposisi perempuan di legislatif hasil pemilu belum terkonfirmasi secara ajek karena memang belum menjadi amanat yang tegas," katanya.

Dicontohkannya dalam berbagai undang-undang terkait politik diatur afirmasi minimal 30 persen perempuan. Akan tetapi dalam Undang-undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) tidak ada penegasan tentang 30 persen keterwakilan perempuan. Oleh karena itu, dalam UU MD3 setidaknya melalui revisi kelima UU No 17/2014, harus dima-

Dhian Novitasari
Wakil Ketua DPRD

KR-Istimewa

ramah perempuan karena lebih banyak menekankan 'kontestasi rimba'. Semua calon didefinisikan sekaligus diposisikan memiliki kekuatan yang sama.

"Padahal kenyataannya ada ketimpangan kekuatan, terutama kekuatan dalam aspek finansial dan popularitas sang calon," tandasnya.

Berdasarkan itu, sistem proporsional daftar tertutup dapat menjadi pilihan untuk mengatasi problematika keterwakilan perempuan di legislatif. Dengan sistem itu, caleg perempuan yang menempati nomor urut 1 sampai 3 dan seterusnya, karena penerapan zipper system, akan punya peluang besar mendapatkan kursi di legislatif. Setiap caleg akan terdorong untuk saling bersinergi dan berkolaborasi dalam mengumpulkan suara demi kemenangan partai politik.

Dengan penerapan sistem pemilu daftar tertutup tentu tidak hanya dapat mengatasi problem keterwakilan perempuan di legislatif, tetapi juga ibarat sekali mendayung dua tiga pulau terlampaui. Hal ini karena bisa menjawab segala eksese negatif yang selama ini terproduksi dalam sistem pemilu sebelumnya. **(Dhi)-f**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 22 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005